

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR BESI
OPERASI PRODUKSI 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Blitar)**

Oleh :

ARYO NUGROHO
NIM 0910110012

Disetujui tanggal 15 Januari 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum

NIP. 1960.0810.198601.1.1002

Agus Yulianto S.H. M.H

NIP1959.0717.198601.1.001

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum

NIP. 1960.0810.198601.1.1002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR BESI
OPERASI PRODUKSI 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011
(Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Blitar)**

Disusun Oleh :

ARYO NUGROHO

NIM 0910110012

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum

NIP. 1960.0810.198601.1.1002

Agus Yulianto S.H. M.H

NIP1959.0717.198601.1.001

Ketua Majelis Penguji

Hukum Administrasi Negara

Kepala Bagian Hukum

Administrasi Negara

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

NIP. 1951.0825.197903.1.004

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum

NIP. 1960.0810.198601.1.1002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dr. Sihabudin, SH., M.H

NIP.1959.1216.198503.1.001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia tiada henti sehingga penulis dapat sampai menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya, dengan judul “Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pasir Besi Operasi Produksi 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011 (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar)”

Terima kasih yang mendalam Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan sekaligus selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan motivasi dan arahan kepada penulis dengan sabar
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada umumnya, dan Bapak ibu dosen Hukum administrasi Negara pada khususnya yang selama ini telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis

5. Kedua orangtuaku Bapak Ir.Harpiyanto Nugroho,MM dan ibu Ariani Utami yang telah membentuk kepribadian penulis serta memberikan dukungan penuh baik berupa doa maupun aktivitas sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak Drs. Sumantri, MM selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dan Bapak M. Nurhidayat, ST, MM selaku Kepala Sub Bidang Pertambangan Umum yang sudah memberikan informasi dan kemudahan memperoleh data demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ari Hadiyanto dan Andira Avianti, Neny Amalia Sari saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dewi Salma orang spesial yang selalu memberikan nasehat,doa dan spirit tanpa kenal lelah dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-temanku tercinta, Yan Ardhia Darutama,Sari Sri, Mas Adrian, Muhamad Yunus, Effaan Eryl Ellac, Kakak Novan Wira,Kaffi Wanatul Ma'wa, Ani Oktiana, Trias Kentung, Bambang Hermanto, Kliwon,Monica, dan Sherly, kelompok OMEN, terima kasih motivasinya dan selalu menghibur di saat penat melanda.
10. Seluruh teman-teman D'Hans yang sangat luar biasa kompak, khususnya Dita Anindita Pratiwi, Catur Yulianto , Mbak Dewi Cahyandari Monty, Aghata Pradita, Agant Agdani,Cinthya,Suci Agustina, Zanuar Irvan, terima kasih atas semua masukannya yang bermanfaat.

11. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk semua itu , sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih, semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik. Tentunya skripsi ini masih memiliki kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Akhirnya besar garapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.



Malang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2. Teori Pengambilan Keputusan atau Kebijakan.....	13
3. Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	14
B. Implementasi Peraturan	
1. Pengertian Implementasi Peraturan.....	14
2. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan	16
3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan	19
4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	21
C. Hukum Pertambangan	
1. Istilah dan Pengertian.....	22
2. Asas-Asas Pertambangan.....	23
D. Perizinan	
1. Pengertian Izin Menurut Para Sarjana.....	25
2. Macam-Macam Perijinan	26
3. Bentuk dan Isi-Isi.....	28
4. Sifat-Sifat Keputusan	29
5. Tujuan Perijinan	30
6. Aspek Yuridis Perijinan	31
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	32
8. Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Populasi dan Sampel.....	40
G. Teknik Analisis Data	40
H. Definisi Operasional.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	43
2. Gambaran Umum Pertambangan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar	49
B. Dasar Pertimbangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pantai Jolosutro	56
1. Tata Cara Prosedur Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pantai Jolosutro	56
2. Pertimbangan Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP).....	66
C. Dampak Pemberian Izin Pertambangan di Kabupaten Blitar	70
1. Dampak Jangka Pendek	71
2. Dampak Jangka Panjang	74
D. Solusi Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Pantai Jolosutro.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Sistematika Implementasi Peraturan..... 15



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- 2.Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
3. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2004-2014
- 4.Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi
- 5.Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
- 6.Peta Topografi Wilayah Pertambangan Eksploitasi
- 7.Formulir Pengajuan IUP Eksploitasi Baru
- 8.Formulir Pengajuan IUP Operasi Produksi Baru
- 9.Formulir Pengajuan Pencadangan Wilayah
10. Surat Keterangan Survey



ABSTRAKSI

• ARYO NUGROHO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *pertimbangan pemerintah daerah kabupaten blitar dalam pemberian izin usaha pertambangan pasir besi operasi produksi 503/007/iup-perpanjangan/409.304/xi/2011(studi di dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar),Lutfi Effendi,SH.MHUM dan Agus Yulianto, SH,MH*

Tingginya permintaan pasir besi di pasaran nasional hingga internasional, membuat para pengusaha pertambangan berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas pertambangan produksi pasir besi di pantai Jolosutro. Keluarnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011 dan Surat Ijin Pertambangan Umum (SIPU) no.545/SIPU/04/409.113/2007 yang dipegang oleh Edy Sampurna.

Keluarnya IUP tersebut ternyata menimbulkan pro kontra. Masyarakat menuntut untuk menutup aktivitas pertambangan karena di Peraturan Daerah no.5 tahun 2009 disebutkan bahwa pantai Jolosutro merupakan kawasan wisata. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan ijin tersebut. Selain itu, peneliti akan menanalisis dampak dari adanya aktivitas pertambangan di pantai Jolosutro tersebut.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian, yaitu pantai Jolosutro Desa Ringin Rejo Kecamatan Wates dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya serta Tata Ruang serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengeluarkan ijin pertambangan adalah adanya peraturan yang menyebutkan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah tambang dan izin dikeluarkan sudah sesuai prosedur. Adapun peraturan yang menguatkan dasar pertimbangan tersebut adalah UU no.32 tahun 2004, UU no.4 tahun 2009, PP no.38 tahun 2007 dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup no.11 tahun 2006, meskipun ada peraturan daerah yang bertentangan.

Dikeluarnya peraturan tersebut mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Jolosutro yang bekerja di sektor tambang Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga besar, yakni pendapatan nelayan berkurang, terjadinya rusaknya lingkungan sekitar pantai Jolosutro, semakin menipis komoditas pasir besi sehingga akan terjadi pemberhentian pekerja dalam skala besar serta terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar sehingga terjadi penyempitan lahan.

Kata Kunci : Implementasi, Ijin usaha pertambangan, Pasir Besi